



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-NYA sehingga Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 ini masih belum sempurna, sehingga saran dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan yang akan datang sangat diharapkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Samarinda, Januari 2020

Kepala  
BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

**M.Sa'duddin, Ak., CA., QIA., CFA., CRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19640519 198503 1 001



# DAFTAR ISI

		Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iii
<b>BAB</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
<b>I</b>	1. Dasar Hukum .....	1
	2. Gambaran Umum .....	2
	a. Struktur Organisasi.....	4
	b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .....	6
	c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah .....	12
	d. Visi Misi .....	13
	e. Tujuan dan Sasaran.....	16
	f. Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
<b>BAB</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	18
<b>II</b>	1. Program dan Kegiatan.....	18
	2. Tingkat Pencapaian Pencapaian Program dan Kegiatan).....	20
	3. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.....	25
	4. Permasalahan dan Solusi .....	25
<b>BAB</b>	<b>TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	27
<b>III</b>	1. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	27
	a. Dasar Hukum.....	27
	b. Bidang Kerjasama .....	28
	c. Nama Kegiatan .....	29
	d. Sumber dan Jumlah Anggaran .....	29
	e. Jangka Waktu Kerjasama .....	29
<b>BAB</b>	<b>PENUTUP</b>	30
<b>IV</b>		



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

- I. Susunan Struktur Organisasi
- II. Penghargaan yang Didapat Sepanjang Tahun 2019

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Struktur Organisasi
Tabel 1.2	Jumlah pegawai berdasarkan golongan / ruang
Tabel 1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Pendidikan
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Non Apartur Sipil Negeri
Tabel 1.5	Tujuan dan Sasaran
Tabel 1.6	Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
Tabel 1.7	Kerjasama Optimalisasi Penerimaan Daerah
Tabel 1.8	Kerjasama Penyediaan Data dan Informasi
Tabel 1.9	Nama Kegiatan
Tabel 1.10	Sumber dan Jumlah Anggaran
Tabel 1.11	Jangka Waktu Kerjasama



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. DASAR HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016, Tanggal 22 Nopember 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;



## 2 GAMBARAN UMUM

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan menetapkan kriteria besaran Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD sebagai upaya untuk menata organisasi Pemerintah yang efisien, efektifitas dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan Perangkat Daerah efektifitas dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tugas dan pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

### 2.1 Tugas Pokok

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas Menyiapkan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

### 2.2 Fungsi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Bahan Kebijakan dan Pedoman Penyusunan APBD;
- b. Penyiapan Bahan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Penyiapan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
- d. Pelaksanaan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- e. Pelaksanaan Penetapan Penyediaan Dana (SPD);
- f. Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana ( SP2D)
- g. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- h. Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran kas;
- i. Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;



- j. Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- k. Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- l. Pelaksanaan Restitusi/Pengembalian Kelebihan Pendapatan;
- m. Penyiapan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah;
- n. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Dan Aset Daerah;
- o. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- p. Penyiapan Kebijakan, Pedoman Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah;
- q. Evaluasi Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- r. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
- s. Penyajian Informasi Keuangan Dan Aset Daerah;
- t. Pengkoordinasian Pengumpulan Bahan Pembiayaan Daerah;
- u. Pengkoordinasian Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan;
- v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.



## 2.a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur membawahi Sekretariat dan 5 Bidang sebagai berikut ;

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah tanggungjawab Kepala Badan.

Sekretariat terdiri :

1. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
  2. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
  3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- b. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang anggaran. Kepala Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Badan.

Bidang Anggaran terdiri;

1. Subbidang Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, Kabupaten/Kota dan penyiapan regulasi keuangan;
2. Subbidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian anggaran belanja langsung.



3. Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian anggaran belanja tidak langsung.
- c. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perbendaharaan. Kabid Perbendaharaan dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan terdiri ;

1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan kas daerah.
2. Subbidang Perbendaharaan.I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Perbendaharaan I
3. Subbiang Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Perbendaharaan II

- d. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dibidang akuntansi. Kabid Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

1. Subbidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian akuntansi pendapatan;
2. Subbidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian akuntansi belanja;
3. Subbidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan kordinasi, pembinaan dan pengendalian akuntansi pelaporan;



- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan barang milik daerah. Kabid Pengelolaan BMD dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pengelolaan BMD terdiri :

1. Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan BMD mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan BMD;
2. Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pemindahtanganan dan penghapusan BMD;
3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan BMD mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan BMD;

- f. Bidang Perusahaan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perusahaan daerah. Kabid Perusda dipimpin oleh Kepala Biang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang Perusda terdiri :

1. Subbidang Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Keuangan BUMD mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan BUMD;
2. Subbidang Penyertaan Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyertaan modal.
3. Subbidang Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi., pembinaan dan pengendalian lembaga keuangan daerah;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional



**Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Tabel 1.1





## 2.b Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

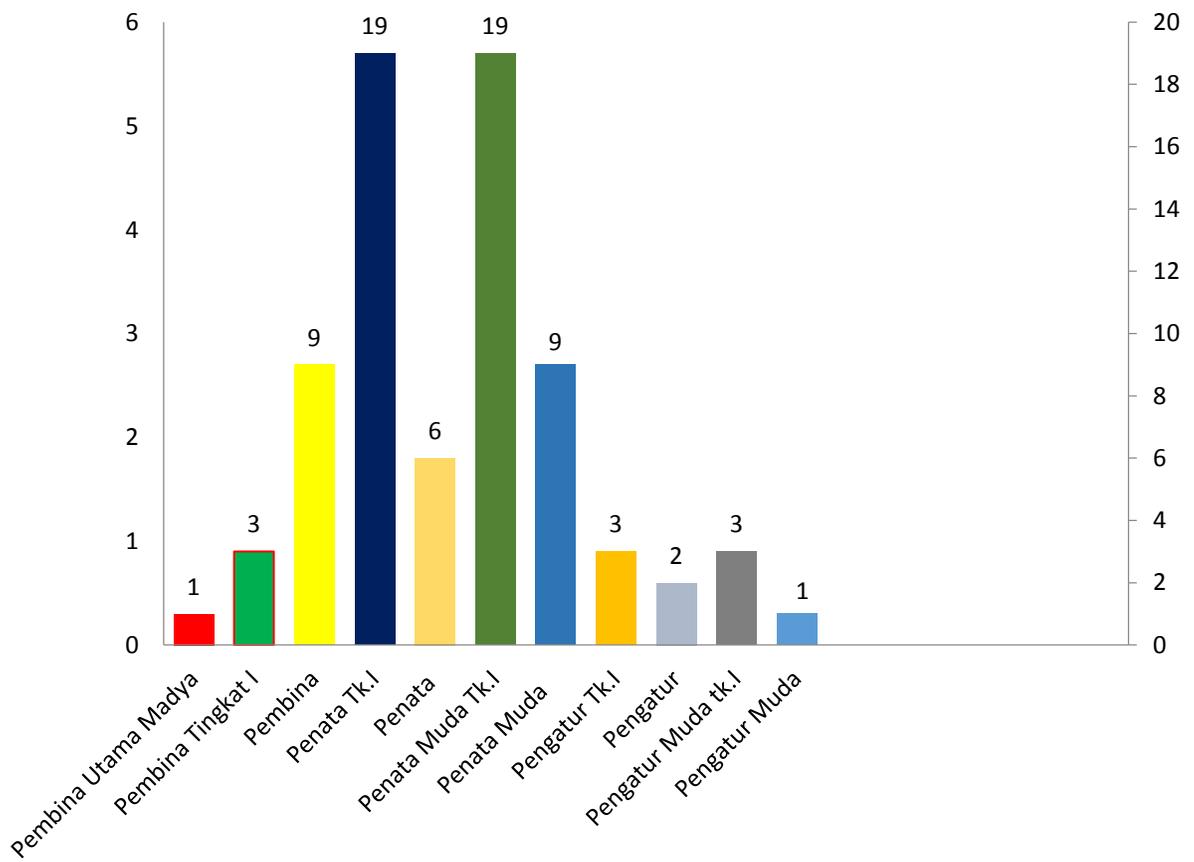
Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal pokok terlaksananya pembangunan, utamanya Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga yang melaksanakan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Pemanfaatan Aset Daerah.

Adapun secara keseluruhan jumlah Pegawai dan Potensi Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan dapat disampaikan sebagai berikut :

### I. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2019

Tabel 1.2

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Madya	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
3.	Pembina	IV/ a	9
4.	Penata Tk. I	III/d	19
5.	Penata	III/c	6
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	19
7.	Penata Muda	III/a	9
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	3
9.	Pengatur	II/c	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
11.	Pengatur Muda	II/a	1
	TOTAL		75



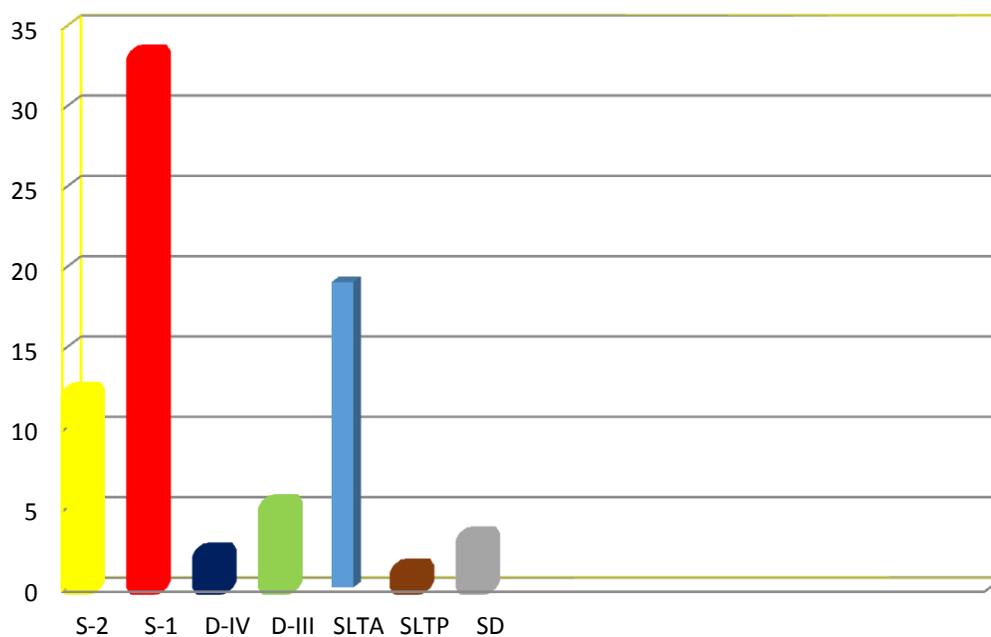
**Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2019**



## 2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel. 1.3

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2 ( Pasca sarjana )	12
2.	S-1 ( Sarjana )	33
3.	D-IV	2
4.	D-III ( diploma )	5
5.	SLTA	19
6.	SLTP	1
7.	SD	3
	TOTAL	75



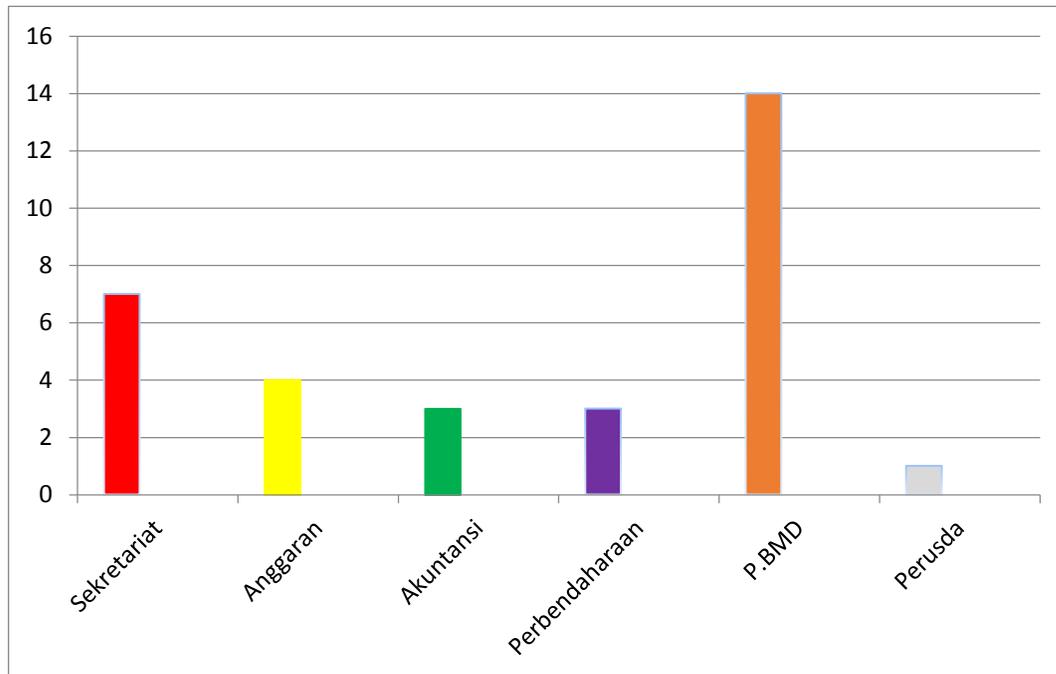
**Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2019**



3 Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri sebagai berikut :

Tabel 1.4

NO.	BAGIAN / BIDANG	JUMLAH
1	Sekretariat	7
2.	Bidang Anggaran	4
3.	Bidang Perbendaharaan	3
4.	Bidang Akuntansi	3
5.	Bidang Pengelolaan BMD	14
6.	Bidang Perusahaan Daerah	1
	TOTAL	32



**Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2019**



## 2.c. Standar Operasional Prosedur (SOP) BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penerapan SOP diharapkan agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik guna mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan sebagai berikut :

- 1) SOP Penyusunan DPA/RKA;
- 2) SOP Pergeseran/ Revisi Anggaran;
- 3) SOP Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- 4) SOP Penyusunan Renstra;
- 5) SOP Penyusunan LAKIP;
- 6) SOP Monitoring Renstra;
- 7) SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Penetapan Kinerja (PK);
- 8) SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- 9) SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan;
- 10) SOP Pengumpulan data kinerja;
- 11) SOP Pembentukan SK Tim;
- 12) SOP Persiapan;
- 13) SOP Pelaksanaan evaluasi;
- 14) SOP Pelaporan;
- 15) SOP usulan pensiun;
- 16) SOP usulan kenaikan pangkat;
- 17) SOP usulan kenaikan gaji berkala;
- 18) SOP usulan cuti;
- 19) SOP pengarsipan;
- 20) SOP peminjaman berkas;
- 21) SOP Permintaan barang;
- 22) SOP Penanganan surat keluar;
- 23) SOP Penanganan surat masuk;
- 24) SOP Pembuat daftar gaji;
- 25) SOP Bendahara penerimaan;
- 26) SOP Pembuatan SPP LS ( belanja modal);



- 27) SOP Pembuatan SPP LS (gaji);
- 28) SOP Pembuatan SPP GU;
- 29) SOP Penerbitan Keputusan Gubernur tentang pejabat KPA/PPK/Pejabat penguji dan penandatanganan SPM dan bendahara (dana APBN);
- 30) SOP Penerbitan Keputusan Gubernur tentang pejabat KPA/PPK/Pejabat penguji dan penandatanganan SPM dan bendahara (dana APBD);
- 31) SOP Penetapan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang APBD/P-APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/PAPBD Kab/Kota.
- 32) SOP Pengelolaan bantuan keuangan Kab/Kota Se-Provinsi Kaltim;
- 33) SOP Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Provinsi Kaltim;
- 34) SOP Penetapan Keputusan Gubernur tentang hasil rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perda Daerah Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota.
- 35) SOP Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D);
- 36) Rekonsiliasi B.IX dengan rekening koran;
- 37) SOP Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 38) SOP Optimalisasi kas daerah pada bank Pemerintah;
- 39) SOP Pembuatan Pencatatan dan Pelaporan Semester;
- 40) SOP Pembuatan Pencatatan dan Pelaporan Triwulan;
- 41) SOP Pembuatan Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan;
- 42) SOP Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Peraturan Daerah( Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub);
- 43) SOP Prosedur Penjualan BMD Kendaraan Dinas Operasional;
- 44) SOP Penjualan BMD dinas jabatan;
- 45) SOP Penjualan BMD kendaraan lapangan;
- 46) SOP Prosedur penjualan BMD rumah golongan III
- 47) SOP Penetapan status golongan rumah dinas;
- 48) SOP Prosedur penghapusan barang bergerak;
- 49) SOP Pemberian rekomendasi HGB;
- 50) SOP Pengamanan BMD yang dikuasai oleh pengelola BMD;
- 51) SOP Penetapan penggunaan BMD;
- 52) SOP Pinjam pakai BMD yang berada di pengelola BMD;
- 53) SOP Tindak lanjut koreksi temuan BPK;
- 54) SOP Inputing dan rekonsiliasi;
- 55) SOP Inventarisasi BMD;



- 56) SOP Prosedur penyusunan laporan barang inventaris;
- 57) SOP Prosedur penyusunan laporan pemeliharaan;
- 58) SOP Prosedur pedoman penyusunan buku DKBMD, DKPBMD, DRKBMD, DRKPBMD
- 59) SOP Prosedur pedoman penyusunan buku standarisasi harga sarana dan prasarana kerja;
- 60) SOP Prosedur laporan barang pakai habis (aplikasi SIKAP);
- 61) SOP Permohonan penerbitan sertifikat tanah milik daerah;
- 62) SOP Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- 63) SOP monitoring dan evaluasi penyertaan modal;
- 64) SOP Persiapan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 65) SOP Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 66) SOP Monitoring rencana kerja anggaran perusahaan;
- 67) SOP Evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan BUMD;
- 68) SOP Pelaksanaan sosialisasi/rakor/fasilitas;

Untuk memperoleh data lengkapnya SOP Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat diunduh pada Website BPKAD Prov.Kaltim di [www.bpkadprov.kaltim.go.id](http://www.bpkadprov.kaltim.go.id)



## 2.d. Visi dan Misi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 yang mengarah pada terciptanya Pemerintah yang bersih, efektif dan efisien.

Berpedoman pada hal tersebut, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Untuk mewujudkan Visi diatas, perlu dirumuskan Misi SKPD untuk memberikan kepastian arah dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan. Kesesuaian antar faktor keberhasilan dengan Misi, maka dirumuskan tujuan, guna tercapainya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah secara optimal.

Pernyataan perwujudan Visi melalui Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah maupun pihak-pihak terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati.

berikut :

### Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah yang Transparan Dan Akuntabel.**

Adapun Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kinerja Dan Kepentingan Publik.
2. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas.



## 2.e. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang diwujudkan dalam kebijakan SKPD.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan tersebut untuk memberikan arah kebijakan terhadap pelaksanaan dan target program/kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 1.5

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Ket
1.	Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Provinsi Kalimantan Timur	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RP.APBD Provinsi Kalimantan Timur	Bidang Anggaran
			Ketepatan Waktu Evaluasi RAPBD dan RPAPBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur	Bidang Anggaran
2.	Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Keuangan Daerah		Ketepatan Waktu Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Gubernur Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Timur	Bidang Akuntansi
			Prosentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Bidang Akuntansi
			Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar	Bidang Perbendaharaan
3.	Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola BMD Yang Berkualitas	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan	Bidang Pengelolaan BMD



## 2.f. Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.



## BAB II

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 1. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD dan SKPKD dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Kegiatan Penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- b. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- a. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja.
- b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD.
- c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD.
- d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- e. Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Kegiatan Implementasi SIMDA Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Daerah.
- h. Kegiatan Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal
- i. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Kegiatan Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- k. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah.



- l. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan
- m. Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota.
- n. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah.
- o. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- p. Kegiatan Penyusunan Standarisasi dan kebutuhan BMD.
- q. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BMD.

**5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.**

- a. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota.
- b. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota.
- c. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.
- d. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Penjabaran APBD Kab /Kota.
- e. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi.
- f. Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.

**6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah.**

- a. Kegiatan Pensertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah.
- b. Kegiatan Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan.
- c. Kegiatan Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah.



## 2. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

Anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebesar **Rp52.719.598.501,00**

Adapun penjelasan terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.6



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja					Total (Rp)
			Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Total	%	
<b>4.04.02.01.07</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>7.550.897.500,-</b>	<b>3.237.845.000</b>	<b>3.430.071.967</b>	<b>0</b>	<b>6.667.918.987,-</b>	<b>88,31</b>	<b>882.978.533,-</b>
4.04.02.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	7.550.897.500,-	3.237.845.000	3.430.071.967	0	6.667.918.987,-	88,31	882.978.533,-
<b>4.04.02.01.08</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.664.287.251,-</b>	<b>0</b>	<b>415.038.429,-</b>	<b>2.801.655.000,-</b>	<b>3.216.693.429,-</b>	<b>87,78</b>	<b>447.593.822,-</b>
4.04.02.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3.377.487.251,-	0	237.407.800,-	2.801.655.000,-	3.039.062.800,-	89,98	338.424.451,-
4.04.02.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	286.800.000,-	0	177.630.629,-	0	177.630.629,-	61,94	109.169.371,-
<b>4.04.02.01.09</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>153.450.000,-</b>	<b>0</b>	<b>97.444.500,-</b>	<b>0</b>	<b>97.444.500,-</b>	<b>63,50</b>	<b>56.005.500,-</b>
4.04.02.01.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0
4.04.02.01.09.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	153.450.000,-	0	97.444.500,-	0	97.444.500,-	63,50	56.005.500,-
<b>4.04.02.01.17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>22.111.876.250</b>	<b>6.564.184.529,41</b>	<b>8.299.897.614,-</b>	<b>109.893.041.60</b>	<b>14.973.975.185,01</b>	<b>67,72</b>	<b>7.137.901.064,99</b>



4.04.02.01.17.01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	763.580.000,-	0	416.649.114,-	0	416.649.114,-	54,57	346.930.886,-
4.04.02.01.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	2.865.000.000,-	936.000.000,-	888.123.061,-	0	1.824.123.061,-	63,67	1.040.876.939,-
4.04.02.01.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	2.020.499.250,-	1.197.800.000,-	445.110.450,-	0	1.642.910.450,-	81,31	377.588.800,-
4.04.02.01.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	630.850.000,-	159.485.000,-	263.999.852,-	0	421.484.852,-	67,13	207.365.149,-
4.04.02.01.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	666.250.000,-	176.173.529,41	274.441.168,-	0	450.614.697,41	67,63	215.635.302,-
4.04.02.01.17.14	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	432.920.000,-	65.150.000,-	224.366.500,-	0	289.516.500,-	66,88	141.403.500,-
4.04.02.01.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kaltim	679.200.000,-	265.200.000,-	17.229.631,-	0	282.429.631,-	41,50	396.770.369,-
4.04.02.01.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	828.962.500,-	317.622.000,-	329.330.665,-	0	646.952.665,-	78,04	182.009.835,-
4.04.02.01.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	818.600.000,-	153.850.000,-	249.931.678,-	0	403.781.678,-	49,33	414.818.322,-
4.04.02.01.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.050.650.000,-	349.439.000,-	433.124.218,-	0	762.563.218,-	74,48	268.086.782,-
4.04.02.01.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian usulan	150.000.000,-	78.500.000,-	8.169.200,-	0	86.669.200,-	57,78	63.330.800,-



	dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah							
4.04.02.01.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendahraan dan Kas Daerah	1.305.700.000,-	729.170.000,-	338.219.776,-	0	1.067.389.776,-	81,75	238.310.224,-
4.04.02.01.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	2.325.500.000,-	823.600.000,-	1.138.192.056,-	0	1.961.792.056,-	84,38	363.707.044,-
4.04.02.01.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	1.407.500.000,-	601.700.000,-	586.899.834,-	0	1.188.599.834,-	84,45	218.900.166,-
4.04.02.01.17.42	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	775.000.000,-	51.000.000,-	291.262.677,-	30.800.000,-	373.062.677,-	48,14	401.937..323,-
4.04.02.01.17.43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaab BMD	4.027.682.000,-	298.700.000,-	1.601.486.893,-	79.093.041.60	1.979.279.934,60	49,14	2.048..402.065,-
4.04.02.01.17.44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	518.625.000,-	203.980.000,-	274.157.973,-	0	478.137.973,-	92,19	40.487.027,-
4.04.02.01.17.46	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BMD	845.357.500,-	156.815.000,-	519.202.868,-	0	676.017.868,-	79,97	169.339.632,-
<b>4.04.02.01.18</b>	<b>Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota</b>							
4.04.02.01.18.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota	435.000.000,-	167.600.000,-	118.200.772,-	0	295.800.772,-	65,70	149.199.228,-
4.04.02.01.18.02	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH	385.000.000,-	63.000.000,-	101.600.700,-	0	164.600.700,-	42,75	220.399.300,-



	Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota							
4.04.02.01.18.07	Evaluasi Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	250.000.000,-	81.800.000,-	51.719.957,-	0	133.519.957,-	53,41	115.480.043,-
4.04.02.01.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	260.000.000,-	88.700.000,-	79.701.341,-	0	168.401.341,-	64,72	91.598.659,-
4.04.02.01.18.09	Pembinaan dan fasilitas APBD Kab/Kota	323.000.000,-	100.727.500,-	57.745.286,-	0	158.472.786,-	49,06	164.527.214,-
4.04.02.01.18.11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	692.587.500,-	234.810.000,-	246.084.411,-	15.600.000,-	496.494.411,-	71,69	196.093.089,-
4.04.02.01.22	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah</b>							
4.04.02.01.22.01	Pensertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	14.543.100.000,-	297.255.000,-	11.409.049.716,-	592.197.000,-	12.298.501.716,65	84,57	2.244.598.283,35
4.04.02.01.22.03	Inventarisasi Barang Aset Daerah							
4.04.02.01.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	1.008.900.000,-	12.300.000,-	428.880.977,-	446.987.000,-	888.167.977,-	88,03	120.732.023,-
4.04.02.01.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	1.341.500.000,-	302.200.000,-	578.004.930,-	29.750.000,-	909.954.930,-	67,82	431.545.070,-
	Jumlah	52.719.598.501,-	11.150.422.029,-	25.313.442.600,65	1.996.082.041,60	40.456.946.671.66	76,75	12.259.651.829,34



### 3. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terbentuk pada tahun 2016 dengan bergabungnya Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki gedung kantor dan masih bergabung dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lantai 5 Kantor Gubernur Kalimantan Timur, sehingga fungsi koordinasi antar bidang menjadi terhambat sedangkan untuk Sarana dan Prasarana lainnya telah memadai.

### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### 4.1 Permasalahan yang dihadapi :

- a. Belum terbarukannya produk hukum daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Kapasitas sumber daya aparatur belum memadai termasuk fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Sistem informasi yang belum optimal untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Implementasi dalam pengembangan maupun penyempurnaan SOP belum optimal terutama terkait pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat/publik maupun kepada perangkat daerah/stakeholder terkait.
- e. Belum memiliki gedung kantor sendiri.

#### 4.2 Solusi :

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;



- a. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Peningkatan dan optimalisasi fungsi pelaksanaan/staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana;
- c. Integrasi sistem informasi antara pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Peningkatan implementasi dalam pengembangan maupun penyempurnaan SOP terkait pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat/publik maupun kepada perangkat daerah/stake holder terkait.



### BAB III

## TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

### 1. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan Tugas Umum Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran cukup besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Peranan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan optimalisasi Pendapatan Daerah melalui pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk sewa lahan dan bangunan dengan pihak ketiga.

Kerjasama lainnya untuk mendukung tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 yaitu dilakukannya kerjasama dengan pihak ketiga untuk Penyediaan Data dan Informasi antara lain :

- a. Sewa Peralatan Jaringan
- b. Sewa Co Location Server.
- c. Simda Keuangan dan Simda Barang.

Adapun terhadap kerjasama tersebut diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Dasar Hukum :**

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4.04.02.07.01.5.2. tanggal 28 Desember 2018.
2. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4.04.02.01.07.01.5.2 tanggal 27 September 2019.
3. Nomor Kontrak 027/1993-V/BPKAD tanggal 01 Oktober 2019 pekerjaan Belanja Sewa Bandwidth Simda BMD dengan PT.Quanta Tunas Abadi.
4. Nomor Kontrak 027/0858-VI/BPKAD tanggal 10 Mei 2019 pekerjaan sewa Co Location Server.



## b. Bidang Kerjasama :

### 1. Kerjasama Optimalisasi Pendapatan Daerah

Tabel 1.7

No.	Pekerjaan	No. Surat Perjanjian	Tanggal	Pihak Ketiga	Jumlah (Rp)
1.	Sewa Lahan	593.11/1302/0375-VI/BPKAD	25 Februari 2019	PT.Jamkrida Kaltim	84.000.000,-
2.	Sewa Lahan	593.11/2897/1020-VI/BPKAD	29 Mei 2019	Hendra Tobing	68.133.492,26
3.	Sewa Lahan	593.11/2897/1021-VI/BPKAD	29 Mei 2019	CV.Media Jaya Advertising	24.288.464,72
4.	Sewa Lahan	593.11/6533/2000-VI/BPKAD	07 Nopember 2019	PT.Bankkaltimtara	46.415.302,50
5.	Sewa Lahan	593.11/6183/1894-VI/BPKAD	28 Oktober 2019	Perusda Pertambangan Barakaltim Sejahtera	394.401.940,67
6.	Sewa Lahan	593.11/5624/1736-VI/BPKAD	30 September 2019	Anton Kandoko Kwan	15.723.113,60
7.	Sewa Lahan	593.11/7504/2170-VI/BPKAD	05 Desember 2019	PT.Bankkaltimtara	505.000.582,85
8.	Sewa Lahan	593.11/1494/0454-VI/BPKAD	08 Maret 2019	CV.Diya Jaya Utama	24.288.488,72
9.	Sewa Lahan	593.11/644/0173-VI/BPKAD	23 Januari 2019	PT.Pelayaran Mercusuar Lintasindo	52.897.540,53
10.	Sewa Lahan	593.11/5515/1695-VI/BPKAD	23 September 2019	CV.Diya Neon Advertising	24.288.464,72
11.	Sewa Lahan	593.11/2111-VI/BPKAD	02 Desember 2019	CV.Kalindo Karya Advertising	11.721.024,26
12.	Sewa Lahan	593.11/5789/1805-VI/BPKAD	30 Oktober 2019	Papan Reklame	633.426,74
13.	Sewa Lahan	593.11/5625/1737-VI/BPKAD	30 September 2019	Hendra Tobing	45.627.859,07
14.	Sewa Lahan	593.11/974/0297-VI/BPKAD	12 Februari 2019	Ir.M.Djunaidi	16.600.000,-
15.	Sewa Lahan	593.11/5626/1736-VI/BPKAD	30 September 2019	Meryani Anggraini	269.759.310,92
16.	Sewa Lahan	593.11/6105/2349-VI/BPKAD	18 Desember 2019	PT.BNI	175.246.440,-
17.	Sewa Lahan	593.11/0221-VI/BPKAD	29 Januari 2019	Tower Bersama Group	73.697.089,-
18.	Sewa Lahan	593.11/1493/0453-VI/BPKAD	08 Maret 2019	PT.Daya Mitra Telekomunikasi	54.818.328,86
19.	Sewa Lahan	593.11/5627/1739-VI/BPKAD	30 September 2019	Swilia Welieta	31.446.227,20

### 2. Kerjasama Penyediaan Data dan Informasi

Tabel 1.8

No.	Pekerjaan	Bidang Kerjasama	Nama Konsultan
1	Sewa Peralatan Jaringan	Teknologi dan Informasi	PT.Quanta Tunas Abadi
2.	Sewa Co Location Server	Teknologi dan Informasi	PT.Cybertechnic Pratama



c. **Nama Kegiatan**

Nama Pekerjaan dan Kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 1.9

No.	Pekerjaan	Nama Kegiatan
1.	Sewa Peralatan Jaringan	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Sewa Co Location Server	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.	BPKP Perwakilan Kalimantan Timur	Aplikasi Simda Keuangan dan BMD

d. **Sumber dan Jumlah Anggaran**

Tabel 1.10

No.	Pekerjaan	Anggaran (RP)	Sumber Dana
1.	Sewa Peralatan Jaringan	150.000.000,-	APBD
2.	Sewa Co Location Server	175.000.000,-	APBD

e. **Jangka Waktu Kerjasama**

Tabel 1.11

No.	Pekerjaan	Waktu Kerjasama	Sumber Dana
1.	Sewa Peralatan Jaringan	360 hari (12 bulan)	APBD
2.	Sewa Co Location Server	360 hari (12 bulan)	APBD



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Khususnya pasal 69 dan pasal 70 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### B. Saran

Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala  
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset  
Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

**M. Sa'duddin, Ak.,CA.,QIA.,CFrA.,CRMP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19640519 198503 1 001



## Penghargaan-Penghargaan yang diraih Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

---

1. Penghargaan Opini WTP atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018 dan selama 5 Tahun berturut-turut dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.



2. Penghargaan katagori Pengelolaan DAK Fisik Per Bidang Terbaik Tahun 2019 dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur.



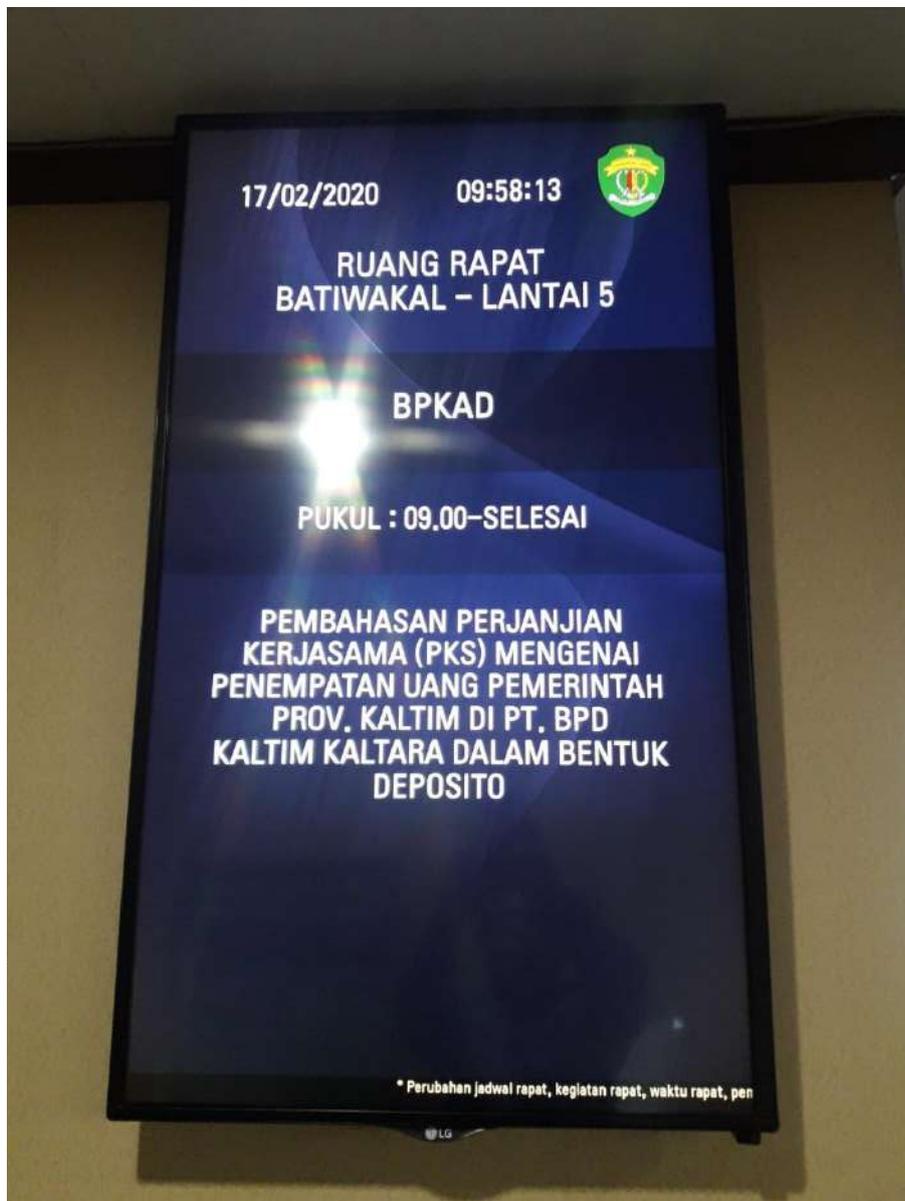
3. Terbaik 1 Lomba Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.



4. Peringkat 3 Katagori Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Via Website oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur



MEDIA ELEKTRONIK DI BPKAD PROVINSI KALTIM





# STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

